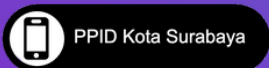


Laporan Akses Informasi Publik PPID Kota Surabaya

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat disusun.

Laporan ini disajikan sebagai bentuk dokumentasi dan transparansi layanan akses informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya. Berbeda dengan laporan layanan informasi publik yang memuat uraian program dan kegiatan secara luas, dokumen ini berfokus pada penyajian data statistik permohonan informasi publik dalam bentuk infografis serta uraian rinci yang menjelaskan komposisi dan tren permohonan sepanjang periode pelaporan.

Adapun informasi yang disajikan dalam laporan ini mencakup, antara lain: jumlah permohonan informasi, waktu penyelesaian, status penyelesaian permohonan, dan alasan penolakan permohonan, jumlah permohonan setiap tahunnya. Penyusunan laporan dilakukan berdasarkan pencatatan dan rekapitulasi layanan pada sistem informasi PPID Kota Surabaya selama Tahun 2025.

Kami berharap laporan berbasis data ini dapat menjadi bahan evaluasi internal untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik, sekaligus menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam melihat perkembangan kebutuhan informasi masyarakat. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyajian data dan penguatan kualitas layanan di periode berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini.

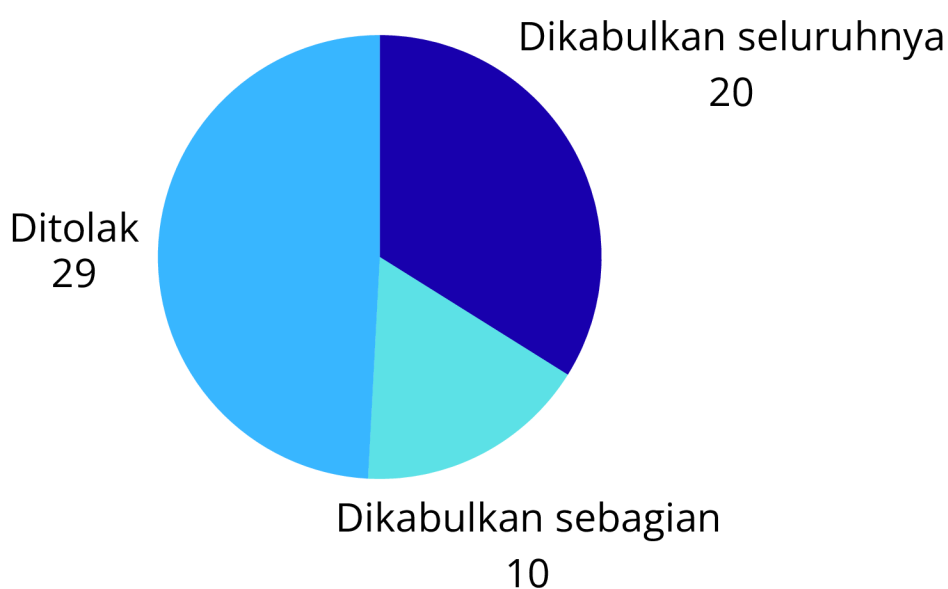


Dokumen ini Ditandatangani Elektronik oleh:
Pit. KEPALA DINAS
SELAKU PPID KOTA SURABAYA

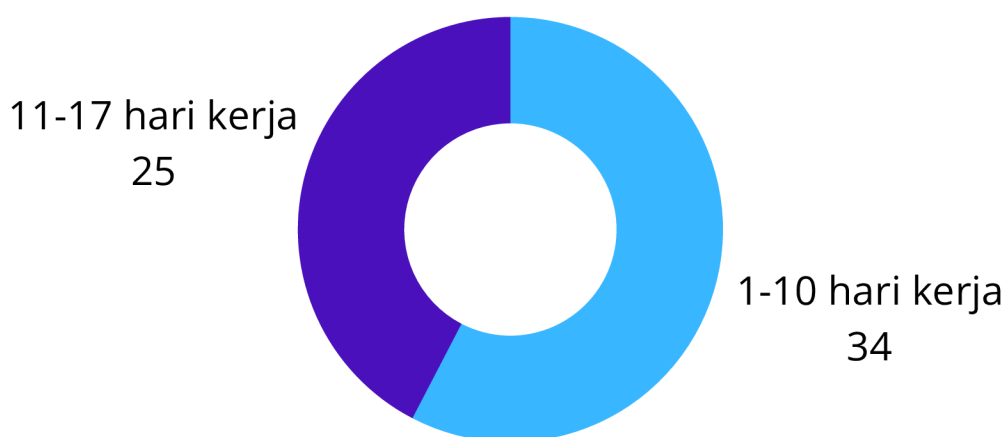
SUDADI, ST
Pembina
NIP.197905052005011017

Laporan Akses Informasi Publik PPID Kota Surabaya Tahun 2025

Jumlah Permintaan Informasi Publik

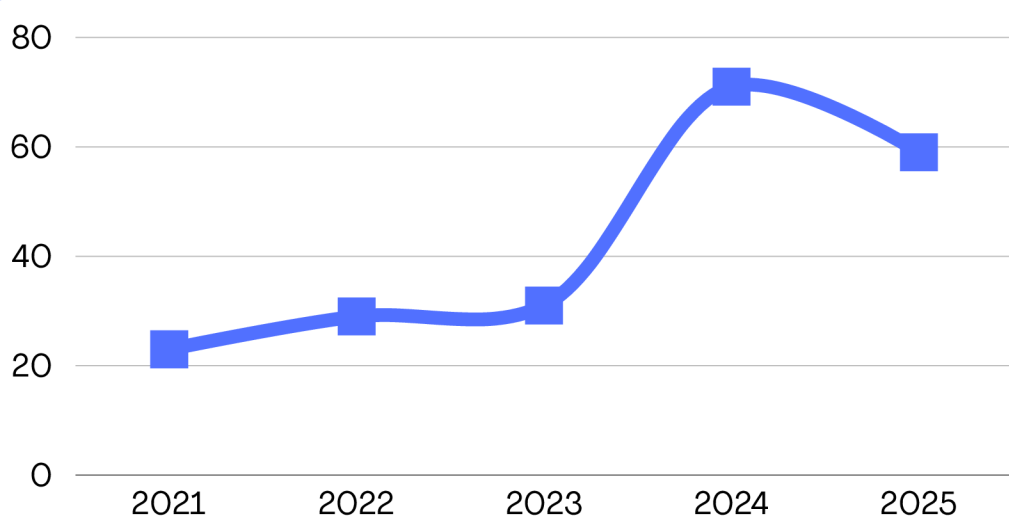


Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik



Jumlah Permintaan Informasi Publik Setiap Tahun

- 2021: 23
- 2022: 29
- 2023: 31
- 2024: 71
- 2025: 59



Alasan Penolakan Permohonan Informasi



LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KOTA SURABAYA TAHUN 2025

NO.	NOMOR REGISTER	NAMA PEMOHON INFORMASI	INFORMASI YANG DIMOHON	WAKTU YANG DIPERLUKAN MENJAWAB (Hari Kerja)	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN / ALASAN PENOLAKAN
					DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	
1	001/PPID/I/2025	Mah xxxx	Permohonan informasi Petok D No. 16981/K Persil No. 0,06 (16) atas nama xxx yang terletak di Jl. Kedinding Lor xxx , dari Petok D No. 7476/K atas nama xxx	10	1			Dikabulkan seluruhnya
2	002/PPID/I/2025	Sla xxxx	Kepemilikan Ijin Usaha dan Nomor KBLI Perusahaan: 1. PT. Prosam Plano 2. PT. Jadi Abadi Corak Biskuit 3. PT. Deverindo Indograha Raya 4. PT. Fast Food Indonesia / KFC 5. PT. Enam Jaya 6. PT. Adhibaladika Agung 7. PT. Atlantic Biruraya 8. PT. ISS Indonesia 9. PT. Gas Security Services 10. PT. Jaya Mas Mandiri Plus 11. PT. Tunjungan Crystal Hotel 12. PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	12			1	Informasi Tidak dikuasai
3	001/PPID/II/2025	Cah xxxx	- Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 dalam format PDF dan shapefile - Zona Nilai Tanah Kota Surabaya terbaru dalam format PDF dan shapefile - Pola Ruang dan Struktur Ruang Kota Surabaya terbaru dalam format shapefile - Toponimi Kota Surabaya terbaru dalam format shapefile	15		1		Terdapat Poin Informasi yang Tidak dikuasai
4	002/PPID/II/2025	Sor xxxx	1. SUROBOYO BUS (tahun 2020-2024) • jumlah perubahan rute atau penambahan rute Suroboyo Bus pertahun (2020-2024) • jumlah pengaduan mengenai Suroboyo Bus melalui media center (2020-2024) • jumlah pengguna suroboyo bus saat promo HUT RI (tanggal 17 Agustus 2024) 2. TRANS SEMANGGI (tahun 2022-2024) • jumlah pengaduan mengenai Trans Semanggi melalui media center 3. FEEDER WIRA WIRI (tahun 2023-2024) • jumlah perubahan rute atau penambahan rute feeder Wira Wiri (2023-2024) • jumlah pengaduan mengenai feeder wira wira wiri melalui media center (2023-2024) • jumlah pengguna wira wiri saat promo HUT RI (tanggal 17 Agustus 2024) • jumlah pengguna tarif integrasi wira wiri & suroboyo bus (2023-2024)	9	1			Dikabulkan seluruhnya
5	001/PPID/III/2025	Dwi xxxx	Permohonan surat rekomendasi ke BPN bahwa tidak dalam pengelolaan BPKAD	16			1	Permohonan yang diminta bukan termasuk informasi publik
6	002/PPID/III/2025	Sam xxxx	Informasi sisa tanah dari kutipan C nomor xxx yang terletak di kelurahan Gununganyar Tambak semula seluas 7500m2 atas nama xxx	16			1	Informasi Tidak dikuasai
7	003/PPID/III/2025	Tat xxxx	1. Kualifikasi data/informasi terkait usaha yang dimiliki 2. Informasi terkait obyek pajak bumi dan bangunan (PBB) 3. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13			1	Informasi dikecualikan

8	004/PPID/III/2025	Tat xxxx	Kualifikasi data/informasi terkait usaha yang dimiliki dan informasi terkait obyek pajak bumi dan bangunan (PBB) dan yunan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13			1	Informasi dikecualikan
9	005/PPID/III/2025	Sas xxxx	1. Data statistik pengaduan masuk pertahun pada aplikasi wargaku mulai tahun 2021-2025 2. Data statistik pengaduan terselesaikan dan masih belum selesai pertahun pada aplikasi wargaku mulai tahun 2021-2025 3. Jumlah anggaran pertahun untuk pengoperasionalan aplikasi wargaku mulai 2021-2025 4. Jumlah IKM Aplikasi Wargaku	5	1			Dikabulkan seluruhnya
10	006/PPID/III/2025	Der xxxx	1. Meminta Informasi Riwayat tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. xxx atas nama xxx yang berasal dari Petok D No. xxx tahun 1960; 2. Copy kretek/krawangan terkait surat hak milik kami Petok D No. xxx tahun 1960 dan klasiran sehingga menjadi Letter C no xxx.	10			1	Informasi Tidak Dikuasai
11	007/PPID/III/2025	Sal xxxx	Salinan Daftar Master Pemegang Ijin Hak Pengelolaan K.M.S. Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1996, yang tercantum didalam Konsideran SK HPL55/HPL/BN/97 Menimbang Huruf c didalam paragraf yang terakhir.	10			1	Informasi Tidak Dikuasai
12	007/PPID/III/2025 (2)	Muc xxxx	1. Apakah bengkel CV. xxx telah mendapatkan atau tercatat memiliki Sertifikat kelas bengkel yang telah memenuhi klasifikasi sesuai dengan kelas bengkel? (mengacu pada Pasal 4 Kepmerindag No. 191/MPP/Kep/6/2001) 2. Tercatat pada Klasifikasi Kelas dan Tipe apakah bengkel tersebut di atas? (mengacu pada Pasal 2 Kepmerindag No. 191/MPP/Kep/6/2001 yang mengatur pada pokoknya klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor dibagi menjadi Kelas I, Kelas II, dan Kelas III dengan masing-masing tipe A,B,dan C) 3. Untuk mekanik Bengkel CV. xxx, apakah memenuhi ketentuan sebagaimana "Kualifikasi Mekanik Bengkel serta mendapatkan "Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada nomor angka 7 Kepmerindag No. 191/MPP/Kep/6/2001? 4. Apakah CV. xxx memiliki izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor?	14			1	Informasi Tidak Dikuasai
13	008/PPID/III/2025	Joo xxxx	1. Meminta informasi nomor register tanah dan register bangunan 2. Hubungan hukum dengan tanah yang saya tempati 3. Status tanah yang saya tempati adalah milik siapa dan amar putusannya meminta keterangan surat bukan aset terlampir 4. Surat pengantar ke BPN bisa mendaftarkan hak atas tanah tanpa ada intervensi Pemkot Surabaya	8			1	Informasi dikecualikan dan Informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
14	009/PPID/III/2025	Pur xxxx	1. Meminta informasi no register tanah dan register bangunan. 2.. Hubungan hukum dengan tanah yang saya tempati. 3. Status tanah yang saya tempati adalah milik siapa dan amar putusannya meminta keterangan surat bukan aset terlampir. 4. Surat pengantar ke bpn bisa mendaftarkan hak atas tanah tanpa ada Intervensi pemkot Surabaya.	8			1	Informasi dikecualikan dan Informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
15	011/PPID/III/2025	Erv xxxx	1. Meminta Informasi DASAR HUKUM yaitu Hubungan Hukum antara Sertifikat HPL No. 3 / Kelurahan Perak Barat seluas 221.482 M2 (Bidang) dengan Tanah yang kami tempati di Jl. Ikan Dorang No. 15 Surabaya seluas 270 M2 (Persil) 2. Meminta Informasi NOMOR REGISTER TANAH dan NOMOR REGISTER BANGUNAN yang terkait didalam Register SIMBADA dari SHP No. 3 / Kelurahan Perak Barat.	7		1		Terdapat Informasi dikecualikan dan Informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya

16	012/PPID/III/2025	Asw xxxx	1. Meminta informasi no register tanah dan register bangunan. 2. Hubungan hukum dengan tanah yang saya tempati. 3. Status tanah yang saya tempati adalah milik siapa dan amar putusannya meminta keterangan surat bukan aset terlampir. 4. Surat pengantar ke bpn bisa mendaftarkan hak atas tanah tanpa ada intervensi Pemkot Surabaya.	7			1	Informasi dikecualikan dan Informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
17	013/PPID/III/2025	Nov xxxx	1. Meminta informasi no register tanah dan register bangunan. 2. Hubungan hukum dengan tanah yang saya tempati. 3. Status tanah yang saya tempati adalah milik siapa dan amar putusannya meminta keterangan surat bukan aset terlampir. 4. Surat pengantar ke bpn bisa mendaftarkan hak atas tanah tanpa ada intervensi pemkot Surabaya.	7			1	Informasi dikecualikan dan Informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
18	014/PPID/III/2025	Pau xxxx	1. Meminta informasi no register tanah dan register bangunan. 2. Hubungan hukum dengan tanah yang saya tempati. 3. Status tanah yang saya tempati adalah milik siapa dan amar putusannya meminta keterangan surat bukan aset terlampir. 4. Surat pengantar ke bpn bisa mendaftarkan hak atas tanah tanpa ada intervensi pemkot Surabaya.	7			1	Informasi dikecualikan dan Informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
19	015/PPID/III/2025	Sas xxxx	1. Jumlah data pengaduan terbanyak setiap tahun 2. Jumlah pengaduan per topik setiap tahunnya beserta penanggungjawab instansinya	6	1			Dikubulkan seluruhnya
20	016/PPID/III/2025	Tan xxxx	1. Meminta Informasi berupa salinan SERTIFIKAT yang didasarkan Surat dari Kepala BPKAD Kota Surabaya kepada Ketua 1 FASIS dengan Nomot 500.17/4054/436.6.2/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Tanggapan 2. Meminta Salinan berupa Izin dari Negara berupa Surat Keputusan Izin Pemakaian Tanah (SK IPT) dari Menteri atas diterbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) berupa NOMOR dan TANGGAL dari SK IPT tersebut atas telah diterbitkannya Izin Pemakaian Tanah atas nama Tan Sauw Tung di Jalan Simolawang Baru 1/49 Surabaya. 3. Meminta salinan Sertipikat IPT yang dinyatakan sebagai Barang Milik Daerah yang didasarkan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 4. Meminta informasi salinan atas NOMOR REGISTER TANAH dan NOMOR REGISTER BANGUNAN yang terkait didalam Register SIMBADA	12			1	Informasi dikecualikan dan Informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
21	017/PPID/III/2025	Lil xxxx	1. Wawancara dengan leading sector terkait implementasi kebijakan kuota 2% pegawai disabilitas di lingkungan Pemkot Surabaya 2. Jumlah disabilitas yang bekerja di Kota Surabaya berdasarkan jenis pekerjaannya 3. Sebaran OPD yang memiliki pegawai disabilitas beserta jumlah disabilitas masing-masing OPD tersebut 4. Jumlah keseluruhan pegawai (ASN & Non ASN) pada tiap OPD di Kota Surabaya	8		1		Terdapat Poin Informasi yang Tidak Dikuasai
22	001/PPID/IV/2025	Edi xxxx	Penjual dan pembeli persil tambak atas nama xxx, Kelurahan Medokan Ayu, no Persil xxx.	6			1	Informasi dikecualikan
23	002/PPID/IV/2025	Fan xxxx	Copy Akta Pertelaan	17			1	Informasi dikecualikan
24	003/PPID/IV/2025	Ani xxxx	Copy Akta Pertelaan	17			1	Informasi dikecualikan
25	004/PPID/IV/2025	And xxxx	Salinan / Copy SK Pertelaan Apartemen Bale Hinggil Surabaya	15			1	Informasi dikecualikan
26	005/PPID/IV/2025	Rac xxxx	1. Perijinan Pusat Layanan dan Konsultasi Psikologi Adeceya Surabaya 2. Izin praktek atas nama xxx	16			1	Informasi Tidak Dikuasai
27	006/PPID/IV/2025	Eri xxxx	Informasi riwayat tanah atas nama xxx sesuai dengan yang tercatat di buku Kretek Kelurahan Rangkah Surabaya, tercatat Petok D No. xxx	14	1			Dikubulkan seluruhnya

28	007/PPID/IV/2025	Els xxxx	1. Data OPD yang paling banyak menerima laporan/keluhan di Aplikasi Wargaku 2. IKM Aplikasi Wargaku Tahun 2023 dan 2024	5	1		Dikabulkan seluruhnya
29	001/PPID/V/2025	Nov xxxx	Meminta Salinan Berkas Surat Permohonan dari PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA tertanggal 9 Mei 1980 beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu yang digunakan Ketika mendapatkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : S3/HPL/DA/87 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA dari MENTERI MENTERI DALAM NEGERI pada Tanggal 12 Desember 1987 yang tertuang didalam konsideran Membaca.	14		1	Informasi Tidak Dikuasai
30	002/PPID/V/2025	Cho xxxx	1. Data jumlah pengguna aplikasi wargaku yang terbaru 2. Data jumlah pengaduan yang diterima melalui aplikasi wargaku 3. Data jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk aplikasi wargaku (jika ada) 4. Pedoman/tata cara penggunaan aplikasi wargaku sesuai dengan website / aplikasi wargaku yang terbaru	1	1		Dikabulkan seluruhnya
31	003/PPID/V/2025	Alm xxxx	1. Jumlah permohonan layanan perizinan yang masuk melalui aplikasi SSW Alfa di Kota Surabaya pada tahun 2022-2024. 2. (Jika tersedia) Data permohonan perizinan digital melalui SSW Alfa khusus di wilayah Kelurahan Gayungan pada tahun yang sama. 3. Jenis-jenis perizinan yang paling banyak diajukan melalui aplikasi tersebut.	2	1		Dikabulkan seluruhnya
32	001/PPID/VI/2025	Roc xxxx	Keterangan status Izin Pemakaian Tanah (IPT) atas tanah terletak di Jl. Pucang xxx Surabaya	10		1	Informasi dikecualikan
33	002/PPID/VI/2025	Fra xxxx	Permohonan keterangan Letak Objek Pajak Nomor : 35.78.050.004.016.0142.0 atas nama xxx, apakah sama dengan letak tanah sebagaimana dimaksud didalam SHM No. xxx atas nama xxx ?	12		1	Informasi Tidak Dikuasai
34	003/PPID/VI/2025	Sal xxxx	1. Meminta Salinan Bukti Kepemilikan berupa SERTIPIKAT diatas Tanah yang kami kuasai sejak Tahun 1970 di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya , yang Saudara sampaikan merupakan tanah Aset Pemerintah kota Surabaya yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) didalam Surat Teguran yang Saudara ditujukan kepada kami sbb ; - Teguran I dengan Tanggal 16 April 2025 Nomor 500.16.7.2 /5480/436.8.2/2025 - Teguran II dengan Tanggal 22 Mei 2025 Nomor 500.16.7.2 /7362/436.8.2/2025 , dan - Teguran III dengan Tanggal 18 Juni 2025 Nomor 500.16.7.2 /8855/436.8.2/2025 2. Mohon kami diberikan Informasi Dasar Hukum antara Izin Pemakaian Tanah dengan Sertipikat yang dikuasai oleh Pemerintah kota Surabaya, sehingga terdapat Hubungan Hukum antara Sertipikat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Izin Pemakaian Tanah (IPT) 3. Meminta Salinan Permohonan Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tanah di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya , yang telah habis masa berlakunya 4. Mohon Informasi didalam Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah , yang Saudara gunakan sebagai dasar pendakuan Aset dari Pemerintah Kota Surabaya yang didasarkan Perpu No. 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah	9		1	Informasi dikecualikan dan Informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya

35	004/PPID/VI/2025	Sor xxxx	<p>1. Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas tahun 2023 hingga 2025. transportasi yang nyaman mencakup - Transportasi yang menyediakan fasilitas yang nyaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - waktu keberangkatan yang terjadwal - akses informasi yang mudah - Kemudahan transaksi pembayaran - pelayanan pelanggan responsif <p>2. Persentase penduduk terlayani transportasi umum Kota Surabaya tahun 2024 hingga 2025</p> <p>3. Demografi pengguna layanan transportasi umum dipilah berdasarkan jenis kelamin dan usia pada transportasi Suroboyo Bus, Trans Semangi, dan Wirawiri pada tahun 2023 hingga 2025</p>	10	1		Dikabulkan seluruhnya
36	001/PPID/VII/2025	Kur xxxx	Permohonan informasi resmi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dokumen perizinan bangunan yang setara (dahulu Izin Mendirikan Bangunan/IMB) atas bangunan yang terletak di Jl. xxx, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur	12	1		Dikabulkan seluruhnya
37	002/PPID/VII/2025	Kur xxxx	<p>Perizinan Berusaha milik PT. Mutiara Cemerlang Abadi selaku pengembang dari perumahan Citraland The Greenlake sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Rencana Umum Tata Ruang 2. Izin Pemanfaatan Lahan 3. Izin Lokasi atau Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) 4. Izin Pengesahan Site Plan dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan itu atas Citraland The Greenlake Surabaya 	12	1		Dikabulkan seluruhnya
38	003/PPID/VII/2025	Her xxxx	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Izin Mendirikan Rumah Sakit Siloam di bawah Apartemen Aryaduta Residence Surabaya 2. Salinan Dokumen Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL) untuk kegiatan tersebut 3. Salinan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 4. Dokumen Hasil Sosialisasi atau Konsultasi Publik yang melibatkan penghuni apartemen dan warga RW.02 RT.02 dan RT. 03 sebagai pihak terdampak 5. Dokumen Pertelaan Kawasan City of Tomorrow (CITO) khususnya Apartemen Aryaduta Residences 	8		1	Legal standing belum terpenuhi
39	004/PPID/VII/2025	Zai xxxx	<p>Status dan kelengkapan perizinan dari empat (4) usaha makanan dan/atau minuman yang beroperasi di wilayah Kota Surabaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesial Soto Boyolali (SSB) yang beralamat di Jl. Raya Prapen No. 4, Prapen, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 2. Kopi Kenangan Diponegoro Darmo Surabaya yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 93 RT.011 RW.001, Darmo., Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 3. Nasi Kapau Langanan Khas Bukit Tinggi yang beralamat di Jl. Raya Jemursari No. 21, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 4. IQOS Partner Excelso Sentral Tunjungan yang beralamat di Jl. Tunjungan No. 73, Genteng, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 	8		1	Tidak memiliki legal standing/kepentingan hukum
40	005/PPID/VII/2025	Abd xxx	Titik Lokasi NOP 35.78.070.002.011.xxxx NOP 35.78.070.002.011.xxxx	14	1		Dikabulkan seluruhnya

41	006/PPID/VII/2025	Pur xxxx dkk	<p>1. Meminta contoh surat yang dibuat atau syarat untuk bisa terbit rekomendasi tidak termasuk dalam pengelolaan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya contoh terlampir sekarang jadi BPKAD karena sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bukan aset pemkot surabaya, apakah suatu keharusan memberikan tanah secara sukarela kepada pemkot surabaya meminta penjelasan secara detail terperinci sampai terwujudnya hak atas tanah SHM, HGB murni sesuai aturan dan ada hubungan hukumnya.</p> <p>2. Meminta contoh surat yang dibuat atau syarat untuk bisa terbit surat rekomendasi bukti terlampir dengan dasar hukumnya yang jelas dan ada hubungan hukum sesuai dengan SK HPL. Sehingga kami tidak kembali lagi jadi surat ijo setelah terbit SHM, HGB murni, HGB diatas HPL kembali jadi surat ijo berikan informasi yang jelas dan terperinci agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum bukan tidak ada hubungan hukum yang sudah berpuluh puluh tahun dan tidak ada kejelasan maupun penyelesaian.</p>	14	1		Terdapat informasi bukan kewenangan Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
42	001/PPID/VIII/2025	Pur xxxx dkk	<p>1. Kami mempertanyakan yang mendalihkan aset pemkot surabaya siapa ya, warga atau pemkot surabaya ? jadi secara tidak langsung mendaftarkan aset pemkot dibenarkan ? bukan mendaftarkan hak atas tanah dan diharuskan mendaftarkan hak atas tanah yang mana tolong tertulis jadi biar tahu yang salah pemkot surabaya atau warganya ?</p> <p>2. Tidak ada no register tanah dan reghister bangunan berkali kali kami pertanyakan tidak pernah diberikan kata pemkot aset atau arsip vital tapi tidak ada no register tanah dan register bangunan. Mana no register tanah dan no register bangunan sedang ada yang sudah dipublish di online kami berikan bukti terlampir</p> <p>3. Memakai aturan atau pimpinan yang dipakai dalam melaksanakan atau menjalankan pendaftaran hak atas tanah mohon dijawab secara tertulis buktinya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan</p> <p>4. Sertifikat yang pemkot surabaya berikan kepada warga dasarnya palsu dan pemkot surabaya minta diputuskan pengadilan berkekuatan hukum tetap menjadi asli atau sah diputuskan pengadilan menjadi asli bisa juga harusnya apakah salah kalau kami melakukan demikian</p> <p>5. Pembayaran BPHTB maupun retribusi sewa tanah tidak masuk ke rekening, tidak ada validasi dan tidak</p>	12	1		Terdapat informasi bukan kewenangan Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
43	002/PPID/VIII/2025	Pur xxxx dkk	<p>1. Meminta informasi dasar hukumnya mengatakan diperalat kepada Pak Paulus karena telah meminta informasi dan berkirim surat kepada Kominfo oleh Bu Novi Pejabat Kominfo dan harus tertulis, karena tujuan kami agar kami sebagai organisasi juga tidak merasa memperalat warga padahal ini untuk warga menjadi paham tentang pembelian tanah atau sewa menyewa agar tidak dikadalin sama oknum Pejabat Pemkot Surabaya. Kami juga mempertanyakan apakah pantas Ibu Novi sebagai Pejabat yang tauladan atau sudah melanggar kode etik mengatakan kepada Pak Paulus diperalat ? Kami mempertanyakan tolong dijawab tertulis secara detail mengatasnamakan institusi atau pribadi sehingga kami jelas dan paham arahnya melaporkan kemana. 2. Lebih tinggi mana dan tunduk sama aturan atau pimpinan sedang kami bertanya yang lalu-lalu sudah jelas dijawab informasi diperkecualikan maupun arsip vital dan tidak dijawab maupun dibiarkan katanya Ibu Novi adalah sebuah pelayanan ? 3. Kami mempertanyakan dasar hukum konversi IPT jadi HGB diatas HPL ? dan dasar hukumnya penagihan surat ijo ? ada pepatah malu bertanya sesat dijalan. 4. Meminta salinan SK HPL dan Sertifikat HPL yang Walikota berkirim surat ke Presiden bukti terlampir.</p>	15	1		Terdapat informasi dikecualikan dan informasi tidak dikuasai Badan Publik Pemerintah Kota Surabaya
44	003/PPID/VIII/2025	Deb xxxx	Copy Kartu Keluarga orang tua atas nama xxx NIK xxx	3		1	Informasi dikecualikan

45	004/PPID/VIII/2025	And xxxx	Permohonan Informasi Keterangan Tanah terkait : 1. Petok D No. xxx atas nama xxx Persil No. xxx berdasarkan Akta Jual Beli No. xxx dengan luas +- 1220m2 berlokasi di Jl. Bhakti Husada xxx Surabaya 2. Petok D No. xxx atas nama xxx Persil No. xxx dengan luas +- 421m2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. Ket : xxx berlokasi di Jl. Bhakti Husada xxx Surabaya	7		1	Informasi dicekualikan
46	001/PPID/IX/2025	Al Rizqi xxxx	Mohon informasi apa saja persyaratan untuk mutasi masuk ke pemkot Surabaya? Bagaimanakah prosedurnya?	2	1		Dikabulkan seluruhnya
47	002/PPID/IX/2025	DRS. EC. R. Sat xxxx	1. Meminta Salinan Bukti Kepemilikan berupa SERTIPIKAT atas Bangunan Rumah di Jl. Ngagel Kebonsari II Nomor 16 - 18 Surabaya yang didasarkan Pasal 1 Ayat 11 Jo Pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. sebagai bukti PEROLEHAN YANG SAH. Hal ini saya pertanyakan dikarenakan dalam melakukan pungutan atau RETRIBUSI, maka diatur didalam Pasal 286 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan sbb; (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. (2) Pemerintah Daerah DILARANG melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam UNDANG- UNDANG. 2. Meminta Salinan Permohonan Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Rumah di Jl. Ngagel Kebonsari II Nomor 16 - 18 Surabaya yang Saudara Tagihkan kepada saya hingga Tahun 2025 sebagai Tunggakan RETRIBUSI hingga Tahun 2025 3. Mohon kami diberikan Informasi Dasar Hukum antara Izin Pemakaian Rumah dengan Sertipikat yang dikuasai oleh Pemerintah kota Surabaya, sehingga terdapat Hubungan Hukum antara Sertipikat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Izin Pemakaian Rumah (IPR) 4. Mohon Informasi Salinan didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pemakaian Rumah Milik	10		1	Terdapat Poin Informasi yang Tidak Dikuasai
48	003/PPID/IX/2025	M. Tamb xxx	Apakah PT. Sasana Boga yang beralamat di Ruko Soho BS10 No. 28 Perumahan Royal Residence, Jl. Royal Babatan No. 23-27 Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya masih berada di Alamat tersebut ataukah sudah tidak berada di Alamat tersebut (pindah) ?	14		1	Informasi tidak Dikuasai
49	004/PPID/IX/2025	Tar xxx	1. Meminta Salinan Bukti Kepemilikan berupa SERTIPIKAT atas Bangunan Rumah di Jl. Ngagel Kebonsari II Nomor 22 , Surabaya yang didasarkan Pasal 1 Ayat 11 Jo Pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. sebagai bukti PEROLEHAN YANG SAH. Hal ini saya pertanyakan dikarenakan dalam melakukan pungutan atau RETRIBUSI , maka diatur didalam Pasal 158 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah , dinyatakan sbb; (1) Pajak daerah dan RETRIBUSI daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. (2) Pemerintahan daerah DILARANG melakukan PUNGUTAN atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan UNDANG-UNDANG. Sementara IPR bukan didasarkan UUPA didalam Perda No. 11 Tahun 2013. 2. Meminta Salinan Permohonan Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Rumah di Jl. Ngagel Kebonsari II Nomor 22 , Surabaya yang Saudara Tagihkan kepada saya hingga Tahun 2025 sebagai Tunggakan RETRIBUSI hingga Tahun 2025 3. Mohon informasi yang menjadi Barang Milik Daerah di Jl. Ngagel Kebonsari II Nomor 22 , Surabaya , tersebut apakah TANAH atau BANGUNAN nya yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya. 4. Bila TANAH nya saja atau BANGUNAN nya saja di Jl. Ngagel Kebonsari II Nomor 22 , Surabaya , tersebut	7		1	Terdapat informasi tidak dikuasai dan informasi dicekualikan

50	001/PPID/XI/2025	Chas xxx	Informasi Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama xxx Petok D No. xxx	10			1	Informasi dicekualikan
51	001/PPID/XI/2025	Ikhli xxx	1. Jumlah pengaduan yang masuk dan pengaduan yang terselesaikan disetiap tahunnya melalui Aplikasi Wargaku, jika ada kenaikan dan penurunan disebabkan oleh apa? 2. Data perbulan jumlah warga yang mengajukan pengaduan melalui Aplikasi Wargaku sejak Agustus-Desember 2024	3	1			Dikabulkan seluruhnya
52	002/PPID/XI/2025	Sal xxxx	1. Data laporan masuk tahun ke tahun 2. Data laporan masuk yang sudah ditindaklanjuti 3. Data laporan masuk banyak dari daerah mana 4. Jumlah pengguna aplikasi dari tahun ke tahun 5. Data laporan ditunda tahun ke tahun	1	1			Dikabulkan seluruhnya
53	003/PPID/XI/2025	Ikhli xxx	Data perbulan jumlah masyarakat yang mengajukan pengaduan melalui Aplikasi Wargaku sejak Juli-November 2025	1	1			Dikabulkan seluruhnya
54	001/PPID/XII/2025	Rang xxx	Data Monitoring Kampung Zero Waste RW 7 Kelurahan Ketabang Tahun 2025	5	1			Dikabulkan seluruhnya
55	002/PPID/XII/2025	Kas xxx	1. Sehubungan dengan Pemanfaatan ASET Pemerintah Kota Surabaya melalui Izin Pemakaian Rumah (IPR) , maka kami dengan mendasarkan pada Pasal 49 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , meminta bukti kepemilikan salinan berupa Sertipikat atas Bangunan Rumah di Jl. Kanginan II No. 1 , Surabaya tersebut sebagai bukti kepemilikan yang yang SAH didasarkan UUPA. 2. Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya , kami mempunyai kewajiban membayar Retribusi untuk itu kami mempertanyakan dasar hukum ketentuan atas Penarikan RETRIBUSI tersebut yang didasarkan pada Undang-Undang , sesuai dengan bunyi pasal Pasal 286 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah , dinyatakan sbb (1) Pajak Daerah dan RETRIBUSI daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. (2) Pemerintah Daerah DILARANG melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam UNDANG-UNDANG. Dengan mendasarkan pada Pasal 286 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tersebut diatas kami meminta agar diberikan DASAR HUKUM dari Undang-Undang dan turunan dari Permendagri atas Izin Pemakaian Rumah (IPR)	8		1		Terdapat informasi tidak dikuasai
56	003/PPID/XII/2025	Rohm xxx	1. Data jumlah/tabel pengguna aplikasi WargaKu beserta penjelasannya dari awal tahun berdirinya hingga tahun 2025 2. Data jumlah pengaduan aplikasi WargaKu dari awal tahun berdirinya hingga tahun 2025 3. Data jumlah masukan aplikasi WargaKu dari awal tahun berdirinya hingga tahun 2025	3	1			Dikabulkan seluruhnya

57	004/PPID/XII/2025	Daf xxx	<p>1. Memohon data Agregat Capaian sesungguhnya Imunisasi Dasar Lengkap tiap puskesmas di Surabaya per tahun dengan rentang data yang dimohonkan adalah data tahun 2022 hingga 2024 ditambah dengan data semester 1 tahun 2025.</p> <p>2. Memohon data Agregat Capaian Imunisasi Dasar Lengkap tiap puskesmas di Surabaya yang terlapor secara real dalam Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) per tahun dengan rentang data yang dimohonkan adalah data tahun 2022 hingga 2024 ditambah dengan data semester 1 tahun 2025.</p> <p>3. Memohon data sasaran Imunisasi Dasar Lengkap tiap puskesmas di Surabaya per tahun dengan rentang data yang dimohonkan adalah data tahun 2022 hingga 2024 ditambah dengan data semester 1 tahun 2025.</p>	10	1			Dikabulkan seluruhnya
58	005/PPID/XII/2025	Dr. Sud xxx	Permohonan Salinan Surat Keputusan Replanning PT. Sanggar Asri Sentosa 2024 dalam wilayah Graha Famili, Babatan, Surabaya	-				Informasi dikecualikan
59	006/PPID/XII/2025	Steph xxx	<p>1. Dasar metodologi perhitungan sehingga diperoleh perhitungan volume 6.336 m3, termasuk dokumen resmi yang dapat menjelaskan tata cara dan rumus perhitungan teknis sehingga diperoleh kebutuhan volume 6.336 m3, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parameter hidrologi yang digunakan; - Standar SNI/peraturan teknis yang dijadikan acuan; - Variabel desain seperti run off coefficient, intensitas hujan, durasi desain, dan faktor keamanan. <p>2. Pedoman teknis, SOP, juknis, perwali atau referensi lain yang menjadi dasar penetapan kapasitas drainase dan volume tampungan pada lokasi kami untuk kebutuhan volume sebesar 6.336 m3 tersebut.</p>	1	1			Dikabulkan seluruhnya
JUMLAH				Rata-Rata Waktu: 9 hari kerja	20	10	29	59 Permohonan Informasi